

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN AREA *TRAFFIC*
CONTROL SYSTEM (ATCS) DALAM PENGAWASAN
LALU LINTAS DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

ANGGI KARTIKA MARPAUNG

NPM 1703100090

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **ANGGI KARTIKA MARPAUNG**

NPM : 1703100090

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Kamis, 10 Juni 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,M.SP**

PENGUJI III : **Drs. R. KUSNADI, M.AP**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAHMI M.I.KOM



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **ANGGI KARTIKA MARPAUNG**
NPM : 1703100090
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Pemanfaatan *Area Traffic Control System (ATCS)* Dalam Pengawasan Lalu Lintas Di Kota Medan

Medan, 28 Juni 2021

PEMBIMBING

Drs. R. KUSNADI, M.AP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya, Anggi Kartika Marpaung NPM 1703100090 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian dan ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 03 Mei 2021



Anggi Kartika Marpaung Menyatakan

Efektivitas Pemanfaatan *Area Traffic Control System (ATCS)* Dalam Pengawasan Lalu Lintas Di Kota Medan

**Anggi Kartika Marpaung
173100090**

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan lalu lintas di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pemanfaatan *area traffic control system (ATCS)* dalam pengawasan lalu lintas di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan 3 orang narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif. Penelitian ini terbagi menjadi 4 kategorisasi yaitu: (1) Adanya tujuan yang hendak dicapai; (2) Adanya perencanaan yang matang; (3) Adanya sistem pengawasan dan pengendalian; (4) Adanya supervisi dalam pengawaaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sistem ATCS bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas; (2) Perencanaan dalam penerapan sistem ATCS dilakukan dengan manajemen rekayasa lalu lintas; (3) Sistem pengawasan dan pengendalian sistem ATCS dilakukan diruangan *CC-rooms*; dan (4) Supervisi dalam pengawasan lalu lintas digunakan untuk meningkatkan kinerja petugas.

Kata Kunci: Efektifitas, *Area Traffic Control System (ATCS)*, Pengawasan

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat sampai pada tahap yang sekarang ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan untuk kehidupan di dunia hingga akhirat kelak nanti nya.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis Membuat Skripsi dengan judul **"Efektivitas Pemanfaatan *Area Traffic Control System (ATCS)* Dalam Pengawasan Lalu Lintas Kota Di Kota Medan"**

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yng telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril, materil, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang **Ali Amran Marpaung** dan Ibunda tercinta **Nurmilah Br. Sirait (Alm)** yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Drs Zulfahmi, M.I kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Ananda Mahardika, S.Sos. M.Sp** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak **Drs. R. Kusnadi, M.AP** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
8. Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

9. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
10. Para pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
11. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada abang dan kakak kandung penulis **Irmawati Marpaung S.Pd, Hendra Mawansah Marpaung S.Pd dan Paisal Haris Marpaung S.E** yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi.
13. Kepada teman terbaik penulis **M. Rudiansyah Siregar** yang selalu mendukung dan memberi semangat penulis selama penyelesaian skripsi.
14. Sahabat-sahabat terdekat penulis yang selalu menghibur penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi, **Faridah Juliana Sari, Tati Aprina Manik, Reni Kesuma Putri, Indy Lestari, dan Sella Amelia** yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
15. Kepada **Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai wadah penulis dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dan pengalaman.
16. Kepada seluruh teman-teman kelas A IAP sore pembangunan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya amin.

Medan, 03 Mei 2021

Anggi Kartika Marpaung

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II URAIAN TEORITIS	6
2.1 Efektivitas	6
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	6
2.1.2 Indikator Efektivitas	7
2.1.3 Kriteria Efektivitas	9
2.1.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas	9
2.2 Pemanfaatan	10
2.3 <i>Area Traffic Control System (ACTS)</i>	11
2.3.1 Pengertian ATCS	11
2.3.2 Fungsi ATCS.....	12
2.3.3 Cara Kerja ATCS	12
1.4. Pengawasan Lalu Lintas	14
2.4.1 Pengertian Pengawasan.....	14
2.4.2 Teknik-Teknik dalam Pengawasan	15
2.4.3 Jenis-Jenis Pengawasan	16
2.4.4 Indikator Pengawasan	17
2.5 Lalu Lintas	17
2.5.1 Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas.....	18

BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Kerangka Konsep.....	21
3.3 Definisi Konsep	22
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	23
3.5 Informan atau Narasumber	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7 Teknik Analisis Data.....	25
3.8 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	25
3.9 Deskripsi ringkas Objek Penelitian.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.2 Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PEDOMAN WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kualifikasi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan	44
Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional sampai dengan Tahun 2017	46
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	49
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia	49
Tabel 4.4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan Struktural	50
Tabel 4.5 Pencapaian Kinerja Pengawasan ATCS	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control System dalam Pengawasan Lalu Lintas	21
Gambar 3.2 Bagan Susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Lembar Pengesahan

Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran III : SK- I Permohonan Penetapan Judul

Lampiran IV : SK- II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V : SK- III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VI : SK – IV Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VII : SK – V Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Universitas

Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Balitbang

Lampiran X : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dinas

Lampiran XI : Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan

Lampiran XII : SK-X Undangan Ujian Skripsi

Lampiran XIII : Draft Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami tingkat kemacetan yang cukup parah. Hal demikian ditandai dengan berkembang pesatnya pertumbuhan kota, tingkat pergerakan manusia, serta ruang lingkup kehidupan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk, kendaraan, penghasilan, dan tenaga kerja. Sehingga menimbulkan peningkatan permintaan terhadap mode transportasi. Keragaman transportasi yang semakin meningkat, tidak diseimbangi dengan perluasan jalan atau fasilitas lalu lintas maka hal demikianlah penyebab kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Kehidupan di kota memang sangat berbeda jauh dengan sistem hidup di desa. Kota menjadi pusat kegiatan masyarakat untuk segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah Kota Medan, ibukota Sumatera Utara. Kota Medan menjadi salah satu pusat kota dengan segala aktifitasnya, yang tidak jarang menimbulkan berbagai polemik permasalahan. Salah satunya terkait dengan kemacetan. Kota Medan adalah salah satu kota dengan tingkat mobilitas transportasi yang cukup tinggi, hal demikian menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Dalam hal ini, muncul usulan untuk menggunakan suatu sistem bernama *Area Traffic Control System (ATCS)*.

Area Traffic Control System (ATCS) adalah suatu sistem pengendalian simpang lalu lintas jalan raya dengan menggunakan lampu lalu lintas (*traffic light*) dimana pengaturan lampu lalu lintas pada masing-masing simpang saling

terkoordinasi, sehingga pengguna jalan mendapatkan tundaan yang minimum. ATCS terdiri dari beberapa sistem utama yaitu: *Server*, *Workstation*, yang berfungsi sebagai pusat operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi lalu lintas dari seluruh persimpangan dalam satu area. *Wallmap* yang berfungsi menyediakan informasi status dan kondisi dari lalu lintas. *Local Controller* (*pengontrol persimpangan*), *Video Surveillance (CCTV)* dan *Vehicle Detector*.

Ada beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh bagian ATCS, yaitu mengatur waktu otomatis dari lampu merah untuk mengatasi kemacetan, melancarkan jalan pada saat ada pejabat tertentu yang lewat, merekam adanya pelanggaran dan kecelakaan. Seluruh hasil yang direkam oleh camera tersebut berupa video dan foto disimpan dalam komputer dan dalam periode tertentu dibackup pada media penyimpanan eksternal seperti hardisk eksternal. Sampai saat ini history data tersebut hanya dicatat dalam sebuah buku catatan manual yang kemudian diarsip.

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat pesat tidak dibarengi dengan penambahan ruas jalan dan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas menambah permasalahan lalu lintas disuatu daerah. Padahal pemerintah telah menyerukan gerakan disiplin nasional dalam kehidupan yang bermasyarakat salah satunya yaitu di jalan raya melalui Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Harapan dari Undang-undang ini ialah dapat dijadikan pedoman dalam berlalu lintas oleh masyarakat, namun kenyataannya masih sering ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Masalah berprilaku dalam berlalu lintas di jalan raya itu terwujud dalam

pelanggaran ketertiban lalu lintas yang berupa tidak patuh terhadap rambu lalu lintas, berhenti sembarangan, menaik dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya, melawan arus lalu lintas, parkir sembarangan, berkendara melebihi muatan yang telah ditentukan, tidak menggunakan atribut berkendara secara lengkap, hingga tidak melengkapi diri dengan surat surat berkendara.

Menyikapi masalah kemacetan yang semakin kompleks, Dinas Perhubungan Kota Medan terus melakukan upaya guna memperbaiki persoalan kemacetan. Upaya dalam meningkatkan pengawasan lalu lintas akibat adanya kemacetan, bisa dilakukan dengan cara efektivitas pemanfaatan dari ATCS itu sendiri. Dengan cara mengoptimalkan waktu pada persimpangan lampu merah. Dengan begitu, kendaraan yang akan melintas mampu terkontrol dengan baik. Namun, tanpa disadari masyarakat masih ada yang melanggar aturan lalu lintas. Untuk itu upaya dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan dari ATCS tidak akan optimal jika dari masyarakat sendiripun tetap melakukan pelanggaran. Disinilah dibutuhkan kerjasama dari setiap pihak, baik dari Dinas Perhubungan Kota Medan yang harus mampu memantau pengendara, ATCS yang benar-benar di manfaatkan secara efektif dalam pola pengawasan lalu lintas dan terpenting adalah dari masyarakat itu sendiri yang harus taat akan aturan berlalu lintas. Maka jika semua pihak berkordinasi dengan tepat dalam menanggulangi kemacetan, efektivitas pemanfaatan ATCS dalam mengawasi lalu lintas akan terjalankan dengan optimal. Berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control System (Atcs) Dalam Pengawasan Lalu Lintas Di Kota Medan.*

1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana efektivitas pemanfaatan *Area Traffic Control System (ATCS)* dalam pengawasan lalu lintas di Kota Medan ?

1.7 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan *Area Traffic Control System (ATCS)* dalam pengawasan lalu lintas di Kota Medan.

1.8 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara subyektif, bermanfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi instansi terkait.
- c. Secara akademis, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat

sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara sub bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian dengan menguraikan efektivitas, indikator efektivitas, kriteria efektivitas, pemanfaatan, ATCS, fungsi ATCS, cara kerja ATCS dan pengawasan lalu lintas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dari hasil penelitian..

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Efektivitas

2.3.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Rosalina (2018:6) Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Pekei (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Winardi (2008) Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Konsep efektivitas adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen

organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Jadi terkait dengan adanya ATCS dalam menanggulangi kemacetan lalu lintas bisa di efektifkan dengan pengatur arus persimpangan berupa lampu lalu lintas, penginput data lalu lintas berupa kamera cctv pemantau dan pengirim data berupa jaringan kabel data atau pemancar gelombang.

2.3.2 Indikator Efektivitas

Rosalina berpendapat Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu : a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan

tujuan organisasi dapat tercapai; b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi; c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional; d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan; e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya; h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.3.3 Kriteria Efektivitas

Menurut Siagian (2001:60) Ada beberapa kriteria pengukuran efektivitas dari organisasi yang memberikan pelayanan antara lain : a) Faktor waktu, Ketepatan waktu menunjukkan kecepatan dan ketepatan pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait; b) Faktor kecermatan, Hal ini dapat dijadikan ukuran efektivitas yang didasari atas sikap ketelitian; c) Faktor gaya pemberi layanan, Gaya pemberi layanan dapat menjadi tolak ukur dalam efektivitas, tata cara bicara dan etika sangat berpengaruh terhadap indicator efektivitas.

2.3.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas

Nicholas (2017:34) guna meenjamin suatu efektifitas terhadap suatu usaha terlebih terkait dengan penanggulangani terkait kemacetan, maka ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya diantaranya a) Kuantitas kerja, keterkaitan dengan tingkat efektivitas adalah keterkaitan dengan beban kerja para pekerja yang mana nantinya akan berpengaruh besar terhadap moral dan tingkat efektifitas itu sendiri. b) Kuaalitas kerja, yang ditujukan bahwa tingkat keseriusan pekerja dalam melakukan tanggung jawabnya sehingga tidak mengurangi volume dalam bekerja. c) Pemanfaatan waktu, sebaiknya bagi seorang pekerja yang memiliki loyalitas yang tinggi hendaknya memanfaatkan waaktu dengan sebaik mungkin guna efisiensi dalam bekerja mencapai optimal. d) Kualitas Sumber Daya Manusia, yang pada hakikatnya pekerja memerlukan sebuah arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan tugasnya agar apa yang diinginkan dalam usaha tersebut tercapai.

2.4 Pemanfaatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pean yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.

Menurut Indrigo (2016: 65) pemanfaatan merupakan sebuah langkah dalam mengoptimalkan sebuah proses dan sumber berusaha dalam mencapai target suatu perusahaan.

Menurut Poerwadarminto (2002:125) Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan ATCS adalah memungkinkan pergerakan kendaraan secara kontinu dan meminimumkan tundaan sepanjang arteri dan melalui jaringan jalan utama. ATCS dapat menghasilkan kualitas arus lalu lintas atau tingkat pelayanan terbaik yang mungkin untuk kondisi lalu lintas dan pembatasan lain yang ada. Kualitas diukur dengan sejumlah faktor yang berbeda seperti: tundaan, jumlah berhenti, waktu perjalanan, keamanan lalu lintas, kebebasan bergerak, dan pengaruh lingkungan (gas pengeluaran, kebisingan, dan lain-lain).

2.5 Area Traffic Control System (ACTS)

2.3.1 Pengertian ATCS

Wishnukoro (2008) *Area Traffic Control System (ATCS)* adalah suatu sistem pengendalian simpang lalu lintas jalan raya dengan menggunakan lampu lalu lintas dimana pengaturan lampu lalu lintas pada masing-masing simpang saling terkoordinasi, sehingga pengguna jalan mendapatkan tundaan yang minimum. Dengan penerapan ATCS atau lampu lalu lintas terkoordinasi maka akan terjadi efisiensi pergerakan dan akan meningkatkan kapasitas simpang untuk melayani lalu lintas, waktu perjalanan yang lebih pendek, penurunan tingkat resiko kecelakaan bagi pengendara dan kesempatan juga keselamatan yang lebih tinggi bagi pejalan kaki atau penyeberang jalan serta kenyamanan pengguna jalan yang lebih baik. ATCS sangat baik diterapkan pada persimpangan yang mempunyai banyak titik konflik pergerakan lalu lintas dan volume lalu lintas yang cukup tinggi.

Putranto (2007:23) berpendapat bahwa Adapun manfaat yang diperoleh dengan pengembangan ATCS ini adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan keselamatan lalu lintas; 2) Mengurangi tingkat pemakaian bahan bakar karena berkurangnya waktu perjalanan; 3) Secara tidak langsung mengurangi polusi udara dan kebisingan; 4) Meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan; 5) Memberikan kelancaran pelayanan bagi kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans dan lain-lain.

Area Control Traffic System atau yang dikenal dengan ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas secara terkoordinasi di suatu kawasan, wilayah,

area, daerah. ATCS dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: 1) ATCS yang tidak responsif Menggunakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dioperasikan secara fixed setting berdasarkan data survey tanpa ada sinkronisasi terhadap laju trafik aktual pada simpang; 2) ATCS yang semi responsif Menggunakan detector kendaraan pada APILL dan melakukan sinkronisasi berdasarkan trafik aktual pada simpang yang bersangkutan saja, tetapi tidak ada pengelolaan lalu lintas secara menyeluruh dan terkoordinasi di seluruh wilayah (region); 3) ATCS yang fully responsif Memiliki pusat pengendalian APILL berhubungan dengan komputer dan dilengkapi dengan alat pencatat pergerakan arus lalu lintas berupa detektor sehingga program pengaturan nyala lampu besarnya dapat berubah-ubah.

2.3.4 Fungsi ATCS

Fungsi dari ATCS ini adalah : a) Dapat mengatur waktu sinyal di persimpangan sehingga penggunaan jalan mendapatkan tundaan minimum; b) Memberikan prioritas lampu hijau di persimpangan; c) Dalam keadaan tertentu, memberikan lampu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas seperti ambulan pemadam kebakaran dan lainnya; d) Menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan; e) Menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian yang lainnya di persimpangan.

2.3.5 Cara Kerja ATCS

1) Dimulai dengan merekam aktifitas simpang dengan menggunakan kamera pemantau jenis PTZ kamera. PTZ adalah singkatan dari *Pan Tilt Zoom*. Pan kemampuan kamera untuk dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Tilt

kemampuan kamera dapat bergerak ke atas dan kebawah. Zoom kemampuan kamera untuk memperbesar gambar hingga beberapa kali lipat.

- 2) Menggunakan kabel fiber optik, hasil rekaman tersebut dilanjutkan ke *Node Controller ATCS*. *Node controller ATCS* merupakan kumpulan beberapa perangkat komunikasi data ATCS yang saling terhubung. Pada node controller tersebut hasil rekaman diolah menjadi data untuk dilanjutkan ke room server untuk mengolah pergerakan kamera dilapangan.
- 3) Pada room server ini terdapat banyak perangkat yang tersimpan dalam rak kabinet U19. Salah satu perangkat yang memegang peranan penting adalah *proxy streaming&NVR Server*. *Proxy streaming&NVR server* digunakan sebagai media penyimpanan rekaman yang ditangkap dari kamera dan digunakan sebagai *proxy streaming server streaming* yang mana *proxy server* mampu meneruskan permintaan dari client ke kamera yang terpasang dalam satu jaringan lokal (LAN).
- 4) Hasil rekaman dapat dilihat pada *workstation (CCTV Client)* yang terdiri dari aplikasi CCTV client yang berfungsi memantau, mengontrol, memindai gambar dan fungsi public announcer pada suatu lokasi yang terpasang kamera dan speaker yang terkoneksi didalam jaringan lokal (*Local Area Network*).
- 5) Pengaturan waktu siklus ditentukan pada *workstation (traffic client)* yang berisikan aplikasi traffic client yang digunakan untuk mengatur data persimpangan dan mengendalikan simpang yang terkoneksi didalam jaringan lokal (*Local Area Network*).

- 6) Setelah melewati beberapa tahap, pergerakan dari beberapa simpang yang sudah terkoneksi di dalam jaringan lokal (*Local Area Network*) dapat dilihat pada suatu wall display yang terdiri dari beberapa monitor (*multi-monitor*)

2.4. Pengawasan Lalu Lintas

2.4.3 Pengertian Pengawasan

Menurut Sarsono (2017:107) pengawasan adalah proses pengamatan dalam melakukan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Darwis (2009:125) pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengkoreksian daripada semua pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan/kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*, dimana pengawasan berarti mengamati, meneliti, dan melakukan pengukuran terhadap sebuah kinerja dalam sebuah operasional tertentu. Masing-masing kata mengandung makna pengawasan, ada juga yang mengandung makna pengendalian, perintah, pengarahan, penelitian, dan monitoring. Pentingnya sebuah pengawasan dalam lalu lintas menjadi fokus tersendiri dalam pengurangan angka kemacetan. Terlebih dengan adanya ACTS, membuat Dinas Perhubungan jadi lebih mudah melakukan pengawasan di titik arus jalan kemacetan. Pengawasan yang ketat terhadap kendaraan transportasi di berbagai ruas jalan,

akan meminimalisir angka kemacetan itu sendiri. Untuk itu, sumber daya manusianya juga harus memiliki kompetensi yang unggul agar ketertiban mampu dilakukan.

2.4.4 Teknik-Teknik dalam Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan ada beberapa teknik yang harus diperhatikan agar pengawasan yang dilakukan bisa berjalan maksimal, diantaranya: 1) Pemantauan dalam pengawasan. Pemantauan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, agar program yang direncanakan bias diimplementasikan dengan baik; 2) Pemeriksaan dalam pengawasan. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran; 3) Penilaian dalam pengawasan. Penilaian sebagai bagian dari pengawasan harus dilakukan dengan jujur dan adil. Jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian akan sangat berakibat negative; 4) Wawancara dalam pengawasan. Wawancara dalam pengawasan dilakukan dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawas bias menentukan suatu keyakinan dari kebenaran dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang sesuai dengan rencana awal; 5) Pengamatan dalam pengawasan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan antara data yang diamati dengan yang sesungguhnya terjadi; 6) Analisis dalam pengawasan. Setiap data yang diperoleh dari hasil pengawasan harus dilakukan analisis untuk menentukan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh satuan unit kerja; 7) Pelaporan dalam pengawasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dalam

berbagai kelembagaan selalu memberikan laporan dari apa yang telah dikerjakan, begitu juga dalam sebuah pengawasan.

2.4.3 Jenis-Jenis Pengawasan

Monitoring atau pengawasan dengan ACTS ialah alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan lalu lintas. Tujuan dari *monitoring* ialah mengetahui secara dini penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi dari kegiatan pada lalu lintas sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya, karena menyangkut masalah kemacetan di setiap ruas jalan. Maka monitoring diklarifikasi menjadi 3 jenis yaitu: 1) *One desk Monitoring*, yaitu pemantauan lalu lintas dengan menggunakan prinsip 5C yaitu: a) *Character*; b) *Capital*; c) *Capacity*; d) *Collateral*; e) *Condition Of Econom*;. 2) *On Site Monitoring*, yaitu pemantauan secara langsung tentang keadaan lalu lintas disetiap ruas jalan yang menjadi titik kemacetan. Baik sebagian maupun secara keseluruhan, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan lalu lintas, atau secara menyeluruh apakah dari penyimpangan yang terjadi atas *terms of lending* yang disepakati seperti yang dilakukan melalui: a) Kunjungan lokasi fisik, untuk melihat kondisi dilapangan yang menjadi titik kemacetan; b) *Trade Cheking*, untuk melihat kondisi sejumlah ruas jalan dengan memanfaatkan informasi yang berasal dari ACTS itu sendiri; c) *Exception Monitoring*, yaitu pemantauan lalu lintas dengan ACTS dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang telah berjalan misalnya karena kurag kompetennya pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan dalam memantau akses lalu lintas dengan sesuai *terms of lending*, dikurangi intesitasnya.

2.4.5 Indikator Pengawasan

Menurut Handoko (2009 : 90) indikator - indikator dari pengawasan adalah sebagai berikut : 1) Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan, Dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil – hasil; 2) Pengukuran kerja, Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia - sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata; Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja adalah a. Pengamatan b. Laporan - laporan hasil lisan atau tertulis c. Metode - metode otomatis d. Pengujian atau dengan pengambilan sample; 3) Penilaian kinerja Penilaian kinerja tentunya tak lepas dari motivasi i sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik sehingga menguntungkan bagi perusahaan; 4) Tindakan koreksi Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pengawasan.

2.5 Lalu Lintas

Menurut Penjelasan UU Lalu Lintas No. 14 tahun 1992 pasal 8 ayat 1 huruf C menyebutkan bahwa pengertian alat pemberi isyarat lalu lintas adalah peralatan teknis berupa isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan bunyi untuk memberi peringatan atau mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan, persilangan sebidang ataupun pada arus jalan. Jadi lampu lalu lintas dapat diartikan sebagai lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran

lalu lintas di suatu persimpangan jalan dengan cara memberi kesempatan pengguna jalan dari masing-masing arah untuk berjalan secara bergantian.

Lampu lalu lintas bekerja secara otomatis dengan menggunakan sistem yang disebut *ATCS (Area Traffic Control System)*. Sistem ini digunakan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun, dengan terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, maka dikembangkanlah sistem ATCS yang dapat bekerja menentukan lama penyalaa dari lampu hijau secara otomatis berdasarkan distribusi kepadatan setiap kendaraan. Sistem ini mengontrol lampu Lalu Lintas otomatis dengan menggunakan kamera berbasis mikrokontroler. Kamera tersebut juga digunakan sebagai pengamat kepadatan kendaraan pada suatu persimpangan. Hasil pengamatan tersebut akan diolah oleh komputer sehingga diperoleh persentase data kepadatan pada setiap jalur di persimpangan yang terdapat lampu lalu lintas.

2.5.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas

1. *Physical Bottlenecks*, Kemacetan yang disebabkan oleh jumlah kendaraan yang melebihi batas atau berada pada tingkat tertinggi. Kapasitas tersebut ditentukan dari faktor jalan, persimpangan jalan, dan tata letak jalan.
2. Kecelakaan Lalu Lintas (*Traffic Incidents*), Kecelakaan akan menyebabkan kemacetan karena kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut memakan ruas jalan.
3. Area Pekerjaan (*Work Zones*). Kemacetan yang disebabkan oleh adanya aktivitas konstruksi pada jalan yang mengakibatkan perubahan keadaan

lingkungan jalan. Perubahan ini meliputi penurunan pada jumlah atau lebar jalan, pengalihan jalur, dan penutupan jalan.

4. Cuaca, Keadaan cuaca dapat menyebabkan perubahan perilaku pengemudi sehingga dapat mempengaruhi arus lalu lintas. Misalnya saja ketika terjadi kabut tebal atau hujan deras maka pengendara akan mengurangi laju kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi tersendat dan menyebabkan kemacetan lalu lintas.
5. Alat Pengatur Lalu Lintas (*Traffic Control Devices*), Kemacetan yang disebabkan oleh pengaturan lalu lintas yang bersifat kaku dan tidak mengikuti tinggi rendahnya arus lalu lintas.
6. Acara Khusus (*Special Events*), Merupakan kasus khusus dimana terjadi peningkatan arus yang disebabkan oleh adanya acaraacara tertentu sehingga menyebabkan arus kendaraan menjadi terhambat.
7. Fluktuasi Arus Normal (*Fluctuations in Normal Traffic*), Kemacetan yang disebabkan oleh naiknya arus kendaraan pada jalan dan waktu tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Azuar (2014:11) Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan statistik atau kuantifikasi tertentu, seperti halnya di dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan secara mendalam untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu dalam kehidupan manusia. Apa yang terlihat dan termasuk yang tidak terlihat diselidiki dalam penelitian kualitatif.

Menurut Moelong (2006 : 11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata – kata gambar, dan bukan angka – angka. Hal itu disebabkan oleh adanya pendekatan kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain – lain.

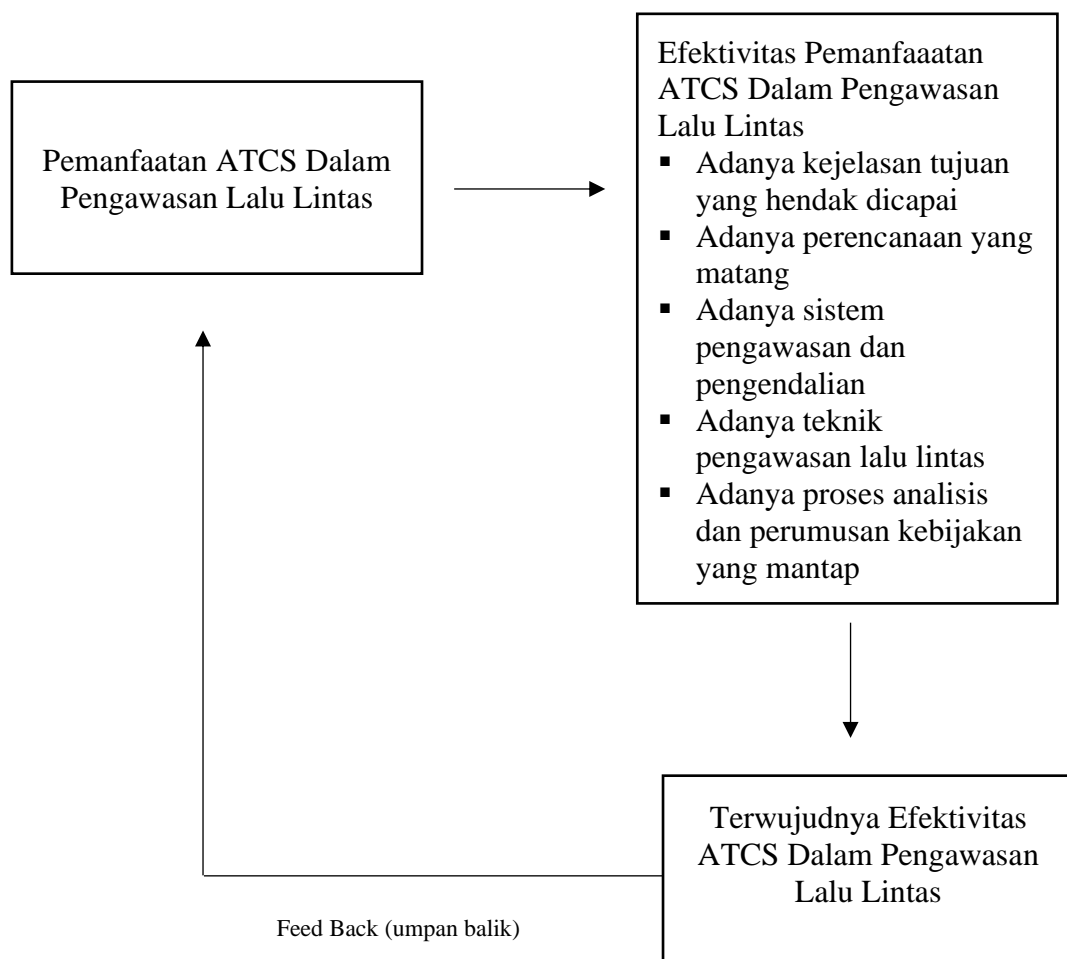
Menurut Sugiyono (2010 : 11) pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

3.2 Kerangka Konsep

Konsep yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pemanfaatan *area traffic control system* (ATCS) dalam pengawasan lalu lintas di Kota Medan. Maka kerangka konsep digambarkan dalam bentuk model teoritis sebagai berikut :

Gambar 3.1

Kerangka Konsep Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control System dalam Pengawasan Lalu Lintas



3.3 Definisi Konsep

Menurut Suyanto (2005:171) konsep adalah makna yang berada di alam pikiran atau di dunia kepehaman manusia yang dinyatakan kembali dengan sarana lambang perkataan atau kata-kata. Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.

Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:

1. Efektivitas adalah ketercapaian suatu rencana yang dituju sesuai dengan sasaran. Dalam penelitian ini dimaksudkan agar penggunaan ATCS dilakukan peningkatan kinerjanya secara efektif mungkin. Agar nantinya pemantauan dari setiap arus jalan tetap terkoornisasi secara berkala.
2. Pemanfaatan ACTS adalah sejauh mana menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya dalam memantau lalu lintas di Kota Medan. Dengan memanfaatkan ACTS ini, diharapkan kemacetan di setiap ruas jalan dapat terkondisikan dengan baik.
3. Area Traffic Control System (ATCS) adalah suatu sistem pengendalian simpang lalu lintas jalan raya dengan menggunakan lampu lalu lintas dimana pengaturan lampu lalu lintas pada masing-masing simpang saling terkoordinasi, sehingga pengguna jalan mendapatkan tundaan yang minimum.
4. Pengawasan dalam lalu lintas menjadi fokus tersendiri dalam pengurangan angka kemacetan. Terlebih dengan adanya ACTS, membuat Dinas Perhubungan jadi lebih mudah melakukan pengawasan di titik arus jalan

kemacetan. Pengawasan yang ketat terhadap kendaraan transportasi di berbagai ruas jalan, akan meminimalisir angka kemacetan itu sendiri.

5. Lalu lintas merupakan teknis berupa isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan bunyi untuk memberi peringatan atau mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan, persilangan sebidang ataupun pada arus jalan.

3.6 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi katagorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Adanya perencanaan yang matang
3. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian
4. Adanya supervisi dalam pengawasan

3.7 Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data – data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Bidang Perencanaan dan Evaluasi

Nama : ihsan

Usia : 38 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Staff Bidang Perencanaan dan Evaluasi

2. Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Nama : Fahrizki

Usia : 35 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Staff Bidang Manajemen Rekayasa Lalu lintas

3. Masyarakat Pengguna Jalan

Nama : Tika

Usia : 29 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Wiraswasta

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Azuar (2014:11) Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya-jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

3.6.2 Data Sekunder

Yakni pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku, dokumen, dan referensi serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung analisis data.

3.7 Teknik Analisis Data

Moeloeng (2006 : 247) mengatakan bahwa Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang menyajikan data yang dimulai dengan menelaah, menyusun, dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan peneliti. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menjelaskan Pemanfaatan Area Traffic Control System (ATCS) Dalam Pengawasan Lalu Lintas Di Kota Medan.

3.8 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau objek penelitian adalah sangat penting karena dijadikan sebagai suatu tempat untuk pengambilan data. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Dinas Perhubungan Kota Medan yang beralamat di Jl. Pinang Baris, Lalang, kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2021 sampai dengan April 2021.

3.9 Deskripsi ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan

Departemen Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet-Kabinet Republik Indonesia. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan disusun berawal dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai luhur yang dianut dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kota Medan yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Berdasarkan peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hubungan daerah. Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan yang efektif, efisien, profesional, handal dan berkemampuan. Dinas perhubungan kota medan adalah instansi pemerintah yang bergerak di pelayanan transportasi darat, laut dan udara. Instansi ini juga menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung transportasi.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan

Visi :

”Menjadi Kota Masa Depan Yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera Dan Religius”

Misi :

Misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan tersebut adalah:

1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan, dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
4. Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Medan

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan. Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.9.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas .
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,

Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, LAKIP, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumah tanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,

unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- f. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan lingkup Dinas meliputi RENSTRA, RENJA, Laporan Kinerja, Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar terkait lainnya sesuai usulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan

Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup sarana dan prasarana angkutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana serta pengujian sarana;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana serta pengujian sarana;
- f. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas

lingkup lalu lintas dan angkutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Angkutan Laut dan Rel;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Angkutan Laut dan Rel;
- f. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;

- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan

Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, pengendalian dan ketertiban lalu lintas, dan keselamatan;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, pengendalian dan ketertiban lalu lintas, dan keselamatan;
- f. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Perparkiran

Bidang Perparkiran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup perparkiran. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perparkiran menyelenggarakan fungsi :

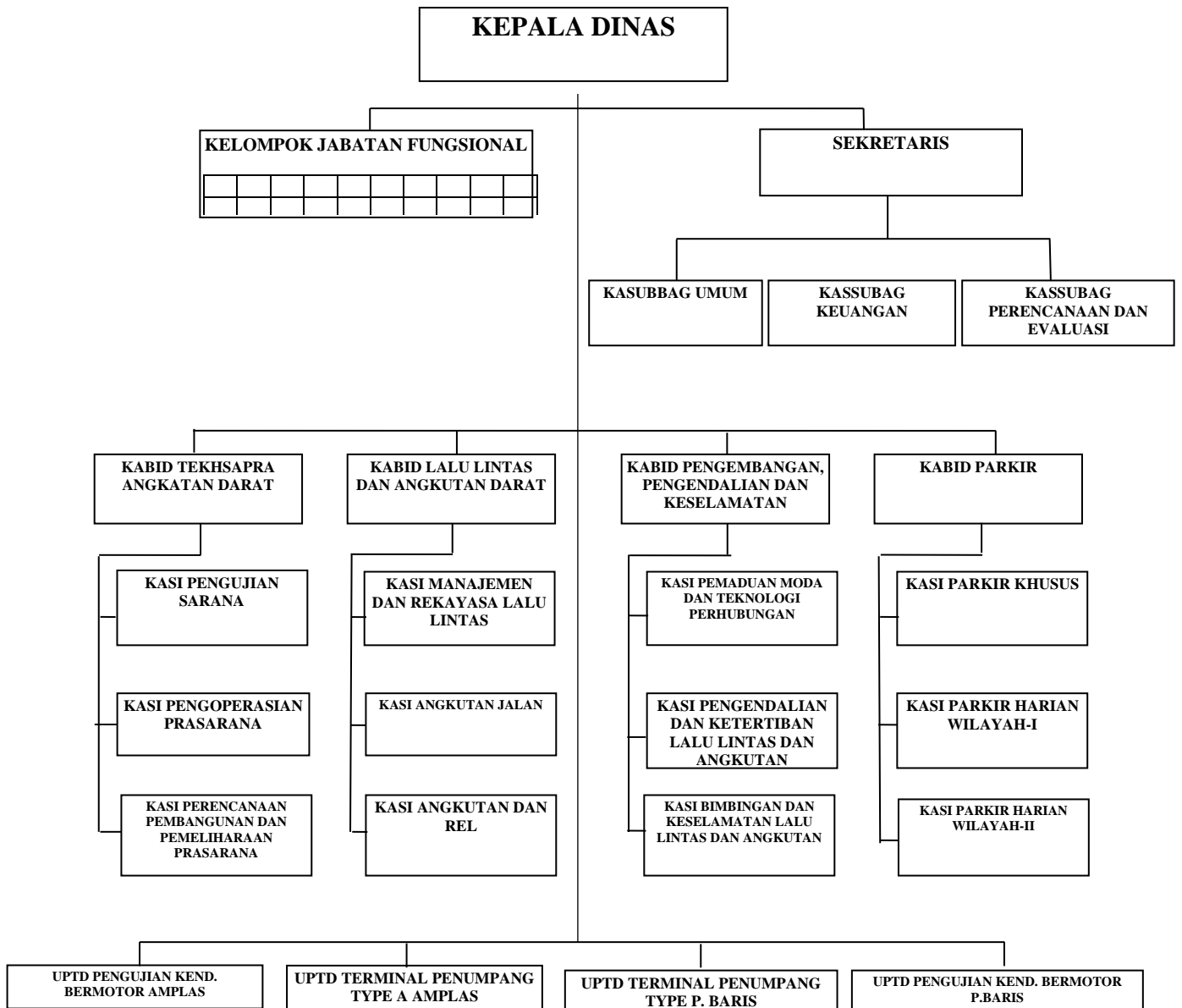
- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang parkir tepi jalan umum dan parkir khusus;
- f. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada Dinas dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan standar kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian/keterampilan dan kebutuhan. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.

Gambar 3.2
BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MEDAN



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan 2016-2021

3.9.5 Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan

Keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan berdasarkan rincian kualifikasi pegawai dan Diklat teknis/fungsional, sebagai berikut pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Kualifikasi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	Persentase (%)
1.	Jumlah Pegawai	616	100
2.	Kualifikasi menurut Pendidikan :		
	2.1 SLTA sederajat	494	80.19
	2.2 D-III	10	1.62
	2.3 S1	97	15.75
	2.4 S2	15	2.44
3.	Kualifikasi menurut Golongan :		
	3.1 Gol. I	35	5.68
	3.2 Gol. II	376	61.04
	3.3 Gol. III	200	32.47
	3.4 Gol. IV	5	0.81
4.	Kualifikasi menurut Jabatan :		
	4.1 Eselon II	1	4.00
	4.2 Eselon III	5	20.00
	4.3 Eselon IV	19	76.00

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas diketahui PNS Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 494 orang (80,19 %) adalah tingkat pendidikan SLTA sederajat selanjutnya 10 orang (1,62 %) memiliki tingkat pendidikan D-III selanjutnya 97 orang (15,75 %) memiliki tingkat pendidikan Sarjana S-1 dan 15 orang (2,44 %) memiliki tingkat pendidikan S-2. Namun berdasarkan data yang ada, dari 616 pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan hanya 10 rang (1,62 %) yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang transportasi dan 10 orang (1,62 %) yang pernah mengikuti kursus teknis/fungsional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 23 orang (3,73 %). Hal ini menunjukkan masih relatif rendahnya kompetensi pegawai untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kota di bidang perhubungan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya jika diamati berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan (61,04 %) atau 376 orang adalah Golongan II, 200 orang (32,47 %) Golongan III, 35 orang (5,68 %) Golongan I dan sisanya 5 orang (0,81 %) adalah pegawai Golongan IV.

Berdasarkan kualifikasi jabatan, pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan sebagian besar sebanyak 19 orang (76 %) Eselon IV, 5 rang (20 %) Eselon III dan 1 orang (4 %) Eselon II.

Dari aspek pengetahuan teknis transportasi, dari 616 pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan hanya 10 orang (0,02%) yang mempunyai latar

belakang pendidikan formal dibidang transportasi dan 26 orang (0,05%) yang pernah mengikuti kursus teknis/fungsional Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 36 orang (0,08%). Hal ini menunjukkan rendahnya kompetensi pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan (Tabel 2.2).

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti
Diklat Teknis/Fungsional sampai dengan Tahun 2017

No.	Nama/Jenis Pendidikan Latihan Teknis	Jumlah Orang
1.	Pembekalan Kepala Dinas	1
2.	Orientasi Tingkat I Lalu Lintas Angkutan Jalan (OLLAJ I)	-
3.	Orientasi Tingkat II Lalu Lintas Angkutan Jalan (OLLAJ II)	1
4.	Orientasi LLASDP	-
5.	Orientasi Pelabuhan	-
6.	Pembantu Syahbandar	-
7.	Manajemen Terminal Angkutan Jalan (MTAJ)	7
8.	Surveior Supervisi LLAJ	-
9.	Otomotif	-
10.	Manajemen Angkutan Umum (Mau)	-
11.	Manajemen Lalu Lintas (MLL)	4
12.	Perencanaan Jaringan Transportasi	2

13.	Analisis Dampak Lalu Lintas (Andall)	3
14.	Teknik Pengumpulan dan Pengolah Data	1
15.	Patroli Pengawasan	-
16.	Pengujian Kendaraan Bermotor	9
17.	PPNS LLAJ	39
18.	Pendidikan Formal di Bidang Transportasi	10
	J u m l a h	77

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan (2015).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.3 Hasil Penelitian

Pada bab ini menyajikan data yang didapat berdasarkan penelitian lapangan atau dikenal dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait yang memberikan penjelasan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh secara langsung melalui beberapa narasumber baik itu dari Dinas Perhubungan Kota Medan, maupun masyarakat pengguna jalan. Selanjutnya, hasil wawancara dari narasumber diuraikan secara sistematis. Adapun penyajian data yang digunakan adalah sebagai berikut:

5.3.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara dilapangan, maka data narasumber dibagi berdasarkan jenis kelamin. Adapun penyajian data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-Laki	2
2	Perempuan	1
	Jumlah	6

Sumber: Hasil Penelitian 2021 di Dinas Perhubungan Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa narasumber berjenis kelamin laki-laki terdapat sebanyak 2 orang, sementara itu narasumber yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang.

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Nama	Pendidikan	Jumlah
1	Ihsan	S1	1
2	Fahrizki	S1	1
3	Tia	S1	1
	Jumlah		3

Sumber: Hasil Penelitian 2021 Di Dinas Perhubungan Kota Medan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa narasumber yang diwawancarai pada penelitian ini ketiganya memiliki pendidikan S1 (Strata 1).

Tabel 4.3
Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia

No	Nama	Usia	Jumlah
1	Ihsan	38	1
2	Fahrizki	36	1
3	Tia	29	1
	Jumlah		3

Sumber: Hasil Penelitian 2021 Di Dinas Perhubungan Kota Medan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa narasumber yang diwawancarai yaitu Bapak Ihsan berusia 38 tahun, Bapak Fahrizki berusia 35 tahun, dan Ibu Tika berusia 29 Tahun.

Tabel 4.4

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Ihsan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan	1
2	Fahrizki	Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan	1
3	Tika	Karyawan swasta	1
		Jumlah	3

Sumber: Hasil Penelitian 2021 Di Dinas Perhubungan Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, dimana narasumber yang diwawancarai 2 orang laki-laki dari Dinas Perhubungan Kota Medan dan 1 orang perempuan dari masyarakat pengguna jalan. Dengan keterangan 1 orang dari Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu Bapak Ihsan, 1 orang dari Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan Yaitu Bapak Fahrizki, dan 1 orang dari Karyawan Swasta yaitu Ibu Tika

5.3.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Medan yang beralamat di Jalan Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Peneliti melakukan wawancara serta melakukan observasi dan dokumentasi untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan *Area Traffic Control System* (ATCS) dalam rangka pengawasan terhadap lalu lintas di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber secara langsung di lapangan, maka telah dilakukan analisis dari setiap jawaban dari narasumber yang diwawancarai, sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

a. Adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ihsan selaku petugas di Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah dilakukan terkait dengan kejelasan tujuan yang hendak dicapai yaitu penerapan sistem ATCS di persimpangan Kota Medan. Bahwasanya beliau mengatakan: “proses pencapaian visi misi sudah mulai terwujud, dimana salah satu tujuan dibentuknya visi dan misi perencanaan strategis adalah terciptanya kondisi lalu lintas yang lancar dan terkendali. Sehingga dengan adanya penerapan alat ATCS mewujudkan tujuan dari visi dan misi dalam perencanaan strategis”..

Penulis juga menanyakan kepada narasumber tentang bagaimana dengan tujuan dibuatnya ATCS ini sudah meminimalisir permasalahan lalu lintas. Beliau mengatakan: “permasalahan lalu lintas sudah mulai dapat diatasi dengan adanya

penggunaan sistem ATCS yang terpasang di beberapa titik persimpangan di Kota Medan, dimana pengendara yang berada dipersimpangan sudah mulai mentaati peraturan, seperti berhenti dibelakang garis”.

Kemudian penulis juga bertanya bagaimana sasaran untuk mewujudkan tujuan yang diterapkan dalam sistem ATCS di Kota Medan. Beliau mengatakan: “sasaran dalam mewujudkan tujuan dengan adanya penerapan sistem ATCS sudah tercapai yaitu untuk menertibkan lalu lintas”

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah tujuan penerapan strategi yang sudah dirancang oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan lalu lintas sesuai dengan adanya penggunaan sistem ATCS untuk mengawasi lalu lintas. Dimana beliau mengatakan bahwa: “Penggunaan sistem ATCS merupakan salah satu alat yang mendukung agar terwujudnya tujuan perencanaan strategis yang telah dirancang untuk mengatasi permasalahan lalu lintas yang mana salah satu tujuannya adalah agar terciptanya kondisi lalu lintas yang lancar dan terkendali”.

b. Adanya perencanaan yang matang

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ihsan selaku petugas di Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah dilakukan terkait dengan perencanaan yang matang dengan diterapkannya sistem ATCS untuk mengawasi lalu lintas di Kota Medan. Beliau mengatakan: “Sebelum diterapkannya ATCS di Kota Medan Dinas Perhubungan Kota Medan yang bekerjasama dengan beberapa pihak terkait telah melakukan

perencanaan yang matang, agar penggunaan sistem ATCS dapat berjalan sesuai dengan tujuan”.

Penulis juga bertanya mengenai apa saja kendala yang dihadapi dalam merencanakan sistem ATCS di Kota Medan. Dimana beliau mengatakan: “kendala yang dihadapi dalam perencanaan sistem ATCS adalah mahal nya biaya perawatan alat ATCS, serta rawannya pencurian terhadap barang elektronik. Akan tetapi, untuk mengatasi pencurian tersebut Dinas Perhubungan telah bekerjasama dengan kepolisian untuk melindungi alat ATCS tersebut agar tidak terjadi pencurian”.

Kemudian penulis menanyakan kepada narasumber mengenai tindak lanjut dari perencanaan yang telah dirumuskan secara matang. Beliau mengatakan bahwa: “tindak lanjut yang dilakukan dengan adanya penerapan sistem ATCS ini adalah yang pertama memantau kondisi lalu lintas di persimpangan Kota Medan yang akan dipasang alat ATCS, kedua dengan melihat pelanggaran apa saja yang sering terjadi, sehingga ketika alat ATCS dipasang di beberapa titik persimpangan, pihak Dinas Perhubungan dapat dengan mudah mengatasi pelanggaran tersebut”.

c. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ihsan selaku petugas di Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah dilakukan terkait sistem pengawasan dan pengendalian yang ada dalam penerapan ATCS. Beliau mengatakan bahwa: “sistem pengawasan dan pengendalian alat ATCS dilakukan di *CC-rooms* dan diawasi langsung oleh Dinas

Perhubungan Kota Medan dengan menggunakan layar monitor untuk memantau lalu lintas dipersimpangan, kemudian apabila terlihat ada pengendara yang melakukan pelanggaran, maka Dinas Perhubungan Kota Medan langsung menegur pengendara melalui *announcer* di persimpangan”.

Penulis juga bertanya mengenai bentuk pengawasan yang diterapkan dalam sistem ATCS. Dimana beliau menjawab: “bentuk pengawasan yang diterapkan dalam sistem ATCS adalah dengan cara mengawasi pengendara melalui *CC-rooms* yang dipantau langsung oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melalui layar monitor”.

Selain itu, penulis juga bertanya bagaimana tindak lanjut dari Dinas Perhubungan terhadap sistem pengawasan ATCS di Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa: “dalam mengawasi pengendara yang dipantau melalui sistem ATCS, tindak lanjut yang dilakukan petugas yaitu menegur pengendara di persimpangan yang terlihat melanggar peraturan melalui *announcer* yang terpasang pada sistem ATCS”.

Kemudian penulis juga mewawancarai masyarakat sebagai pengguna jalan di Kota Medan yang melewati persimpangan yang telah dipasang alat ATCS dengan narasumber Ibu Tika. Beliau mengatakan: “penerapan sistem ATCS ini cukup efektif dilakukan karena dengan adanya alat tersebut pelanggaran lalu lintas semakin berkurang. Selain itu, pengendara juga diawasi oleh pihak Dinas Perhubungan melalui CCTV yang dipasang sehingga pengendara dapat lebih tertib dalam berlalu lintas”.

Penulis juga bertanya kepada ibu tika mengenai kendala apa saja yang terjadi sebagai pengguna jalan dalam adanya penerapan sistem ATCS. Beliau mengatakan bahwa: “Kendala yang terjadi dengan adanya sistem ATCS ini yaitu ada beberapa sistem ATCS yang diletakkan di persimpangan yang kadang tidak aktif, misalnya di simpang Medan Mall”

d. Adanya super visi pengawasan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber yaitu Bapak Ihsan selaku petugas di Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan pelaksanaan supervisi yang dilakukan petugas terkait pemanfaatan ATCS di Kota Medan. Beliau mengatakan: “pelaksanaan super visinya yaitu untuk meningkatkan kinerja petugas dalam menangani permasalahan lalu lintas, meningkatkan keefektifan pengawasan lalu lintas, serta meningkatkan kualitas situasi yang tertib berlalu lintas”.

Bentuk super visi yang dilakukan petugas terhadap sistem ATCS “Adanya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan atasan terhadap petugas agar penerapan sistem ATCS, kemudian adanya laporan yang dibuat petugas dan diberikan kepada atasan untuk dievaluasi mengenai perkembangan lalu lintas setelah adanya sistem ATCS.”

SOP (*Standart Operational Procedur*) pelaksanaan super visi “tidak ada SOP khusus terkait pelaksanaan super visi, yang ada hanya pelaporan pelanggaran yang dilakukan pengendara kepada atasan untuk dilakukan tindak lanjut seperti mengevaluasi pelanggaran yang terjadi”.

5.4 Pembahasan

Pada bagian ini wawancara yang telah dilakukan kemudian dianalisis untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan, sehingga dapat melihat apakah pemanfaatan *Area Traffic Control System* (ATCS) efektif atau tidak dalam melakukan pengawasan lalu lintas di Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut penulis telah menganalisis jawaban dari narasumber yang dijabarkan dalam beberapa poin, antara lain sebagai berikut:

a. Adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Sebagaimana telah disajikan pada uraian terdahulu pada subbab deskripsi hasil wawancara maka dalam menangani permasalahan mengenai kemacetan yang terjadi di Kota Medan, pihak Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara menggunakan *Area Traffic Control System* (ATCS). Adanya program tersebut berguna untuk memantau titik-titik lalu lintas ataupun persimpangan yang menjadi indikasi terjadinya kemacetan. Program ini dilakukan dengan cara memasang CCTV disetiap persimpangan yang rawan terhadap kemacetan. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan pengaturan waktu siklus dipersimpangan.

Kemacetan di Kota Medan sendiri biasanya disebabkan oleh adanya beberapa faktor, antara lain yaitu: volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Dimana hal tersebut tidak diimbangi dengan perkembangan infrastruktur yang ada. Kemudian adanya penumpukan perumahan dan pusat perdagangan yang berada di pinggir jalan. Sehingga hal tersebut dapat menghambat kelancaran lalu lintas.

Penerapan sistem ATCS yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan saat ini telah mewujudkan tujuan dari perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu terwujudnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai, serta terciptanya kondisi lalu lintas yang lancar dan terkendali. Selain itu, dengan diterapkannya sistem ATCS ini juga mewujudkan visi dan misi dari perencanaan strategis Dinas Perhubungan dalam mengelola perhubungan di Kota Medan.

b. Adanya perencanaan yang matang

Sebagaimana telah disajikan pada uraian terdahulu pada subbab deskripsi hasil wawancara maka langkah yang dilakukan sebelum adanya penerapan sistem ATCS ini adalah dengan melihat kondisi langsung dilapangan tepatnya di setiap persimpangan Kota Medan yang rawan terjadinya kemacetan untuk melihat pelanggaran apa saja yang sering terjadi, sehingga ketika alat ATCS dipasang di beberapa titik persimpangan, pihak Dinas Perhubungan dapat dengan mudah mengatasi pelanggaran tersebut.

Kemudian pihak Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan perencanaan dan menetapkan beberapa titik persimpangan yang akan dipasang alat ATCS yang dilengkapi CCTS untuk melakukan pengawasan lalu lintas Kota Medan. Dalam penggunaan ATCS pihak Dinas Perhubungan memiliki kendala yaitu terkait dengan pemeliharaan alat ATCS yang cukup mahal, serta terjadinya pencurian. Namun, pihak Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kepolisian untuk mengamankan alat ATCS agar tidak terjadi pencurian. Kemudian kendala selanjutnya yaitu pada awal penerapan ATCS banyak masyarakat yang belum

mengetahui adanya alat ATCS yang terpasang dipersimpangan jalan yang dilaluinya, sehingga dapat dilihat melalui *CC-room* masih banyak pengendara yang melanggar lalu lintas.

Sementara itu, menurut pengguna jalan kendala yang terjadi dengan adanya sistem ATCS ini yaitu ada beberapa sistem ATCS yang diletakkan di persimpangan yang kadang tidak aktif, misalnya di simpang Medan Mall. Sehingga dengan tidak aktifnya sistem tersebut membuat pengendara tidak tertib dalam berlalu lintas.

Meskipun terdapat beberapa kendala yang terjadi terkait adanya penerapan ATCS ini, akan tetapi dalam hal pengimplementasian program ini sangat efektifitas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas, sehingga terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan.

c. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian

Sebagaimana telah disajikan pada uraian terdahulu pada subbab deskripsi hasil wawancara maka pengawasan *Area Traffic Control System* (ATCS) juga tidak hanya dapat di lakukan di *CC-rooms* ATCS. Tetapi melainkan masyarakat dapat melakukan pengawasan dan pemantauan lalu lintas secara langsung dengan menggunakan website yang telah disediakan pemerintah yaitu dengan mengakses <https://medan.marktel.co>.

Adanya sistem ATCS yang diberlakukan di Kota Medan sangat memudahkan petugas dari Dinas Perhubungan untuk melakukan peneguran secara langsung terhadap pengguna jalan yang dinilai melanggar lalu lintas melalui pengeras suara. Dengan adanya announcer yang berguna untuk menghibau agar

tertib berlalu lintas, misalnya berhenti dibelakang garis yang telah dibuat pada saat dipersimpangan. Sehingga hal tersebut juga dapat memberikan efek jera kepada pengendara.

Data yang didapat dari Dinas Perhubungan Kota Medan pemasangan *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kota Medan terutama pada wilayah CBD terdapat sebanyak 43 simpang Inti Kota sedangkan sampai dengan tahun ini sudah terpasang alat ATCS di 33 (tiga puluh tiga) persimpangan atau sekitar 76,74 % yang tersebar di Kota Medan. Dibawah ini merupakan data penyebaran alat ATCS di Kota Medan:

1. Uniland
2. Simpang Medan Mall
3. Simpang Kesawan
4. Simpang Gaharu Yamin
5. Simpang TVRI
6. Simpang Sudirman Ujung
7. Simpang Monginsidi Pattimura
8. Simpang Jamin Ginting-Iskandar Muda
9. Simpang Jamin Ginting-DR Mansyur
10. Simpang Merdeka
11. Simpang Waspada
12. Simpang Tirtonadi
13. Simpang Istana Maimun
14. Simpang Masjid Raya

15. Simpang Mayestik
16. Simpang Wisma Benteng
17. Simpang Lapangan Benteng
18. SimpangHDTI
19. Simpang Suprpto-Multatuli
20. Simpang Air Mancur Imanuel
21. SimpangBII
22. Simpang Kartini
23. Simpang Walikota
24. Simpang Gubernur
25. Simpang Juanda-Polonia
26. Simpang Istana Plaza
27. Simpang SM Raja-Halat
28. Simpang Sisingamangaraja Pelangi
29. Simpang Sisingamangaraja Nasution
30. Simpang Amplas
31. Stasiun KA
32. Simpang Rahmadsyah
33. Simpang Glugur
34. Simpang Medan Plaza
35. Simpang Sei Wampu
36. Simpang Ayahanda
37. Simpang Sei Sikambing

38. Simpang Gajah Mada-Iskandar Muda
39. Simpang Iskandar Muda-Hasanudin
40. Simpang Iskandar Muda-Abdullah Lubis
41. Simpang Kejaksaan- S Parman
42. Simpang Gaharu Printis
43. Simpang Sutomo-HM Yamin
44. Simpang Sutomo Yamin
45. Simpang HM Joni
46. Simpang Al-Falah
47. Simpang Yos Sudarso-Pembangunan
48. Simpang Yos Sudarso-Pertempuran1
49. Simpang Yos Sudarso-Pertempuran2
50. Simpang Gajah Mada-Wahid Hasyim
51. Simpang Amir Hamzah-Kapt. Muslim
52. Simpang Sunggal-Sei Batanghari
53. Simpang Sunggal Kasuari
54. Simpang Thamrin-Yamin
55. Simpang Kejaksaan-T. Umar
56. Simpang Juanda-Walikota
57. Simpang STM-Tritural
58. Simpang Amal-Gagak Hitam
59. Simpang Sunggal-Gagak Hitam
60. Simpang Asoka-Gagak Hitam

61. Simpang Setiabudi-Industri
62. Simpang Pos
63. Simpang Karya Wisata
64. Simpang Karya Jaya
65. Simpang Katamso-Pelangi
66. Simpang Katamso-Sakti Lubis
67. Simpang Sutomo-Sutrisno
68. Simpang Thamrin-Sutrisno
69. Simpang Thamrin-Asia
70. Simpang Sutomo-Merbabu
71. Simpang Gaharu-Bambu II
72. Simpang Gaharu-Bambu II
73. Simpang Krakatau-Pasar III
74. Simpang Krakatau-Bilal
75. Simpang Krakatau-Sidorukun
76. Simpang Merak Jingga Printis

Pemanfaatan *Area Traffic Control System (ATCS)* dalam pengawasan lalu lintas di Kota Medan sangat membantu dalam mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan selamat. Serta terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan dan mengurangi jumlah petugas pengatur lalu lintas di persimpangan.

d. Adanya supervisi dalam pengawasan

Sebagaimana telah disajikan pada uraian terdahulu pada subbab deskripsi hasil wawancara maka supervisi dalam pengawasan sistem ATCS yaitu untuk meningkatkan kinerja petugas dalam menangani permasalahan lalu lintas, meningkatkan keefektifan pengawasan lalu lintas, serta meningkatkan kualitas situasi yang tertib berlalu lintas”.

Bentuk supervisi yang dilakukan petugas terhadap sistem ATCS “Adanya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan atasan terhadap petugas agar penerapan sistem ATCS, kemudian adanya laporan yang dibuat petugas dan diberikan kepada atasan untuk dievaluasi mengenai perkembangan lalu lintas setelah adanya sistem ATCS.”

Dibawah ini merupakan tabel pencapaian kinerja dengan adanya ATCS dengan melakukan pengawasan lalu lintas yang didapat dari Dinas Perhubungan Kota Medan:

Tabel 4.5

Pencapaian Kinerja Pengawasan ATCS

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan	75%	75%	77%	79%	82%	85%	85%

	kualitas kinerja sumber daya aparatur dinas perhubungan							
2	persentase meningkatnya disiplin dan kesesuaian pegawai dalam berpakaian dinas	85%	85%	88%	90%	95%	96%	96%
3	Persentase sumber daya aparatur yang memahami peraturan dan perundang undangan	50%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
4	Persentase akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase terpenuhinya dasar hukum dalam melaksanakan kebijakan	50%	50%	55%	58%	60%	62%	62%
6	Persentase terealisasinya pelayanan sarana dan prasarana dinas perhubungan kepada masyarakat	60%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
7	Persentase berkurangnya tingkat kemacetan lalu lintas	30%	30%	35%	40%	45%	50%	50%

8	Persentase meningkatnya keselamatan lalu lintas	20%	20%	25%	30%	35%	40%	40%
9	Persentase meningkatnya kelayakan angkutan umum dan barang	20%	20%	22%	24%	26%	27%	27%
10	Persentase minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum	30%	30%	35%	40%	45%	60%	60%

(sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan)

Berdasarkan data yang diambil melalui Dinas Perhubungan Kota Medan bahwasanya tingkat persentase berkurangnya pelanggaran lalu lintas dari sebelum adanya pemanfaatan *Area Traffic Control System (ATCS)* maupun setelah adanya pemanfaatan ATCS cukup mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam hal ketertiban lalu lintas. Dimana terlihat bahwa sebelum adanya ATCS pelanggaran lalu lintas hanya dapat diatasi sekitar 30%, namun dengan adanya alat ini tingkat pelanggaran lalu lintas dapat diatasi sekitar 50%

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pemanfaatan *Area Traffic Control System* (ATCS) Dalam Pengawasan Lalu Lintas Di Kota Medan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan diterapkannya sistem ATCS ini telah tercapai untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Hal ini sudah terbukti karena sebelum adanya penerapan ATCS persentase tingkat penanganan pelanggaran lalu lintas hanya dapat diatasi sebesar 30%, dan setelah adanya ATCS pelanggaran lalu lintas yang dapat ditangani sebesar 50%.
2. Perencanaan dalam penerapan sistem ATCS juga sudah dilaksanakan dengan matang yaitu melalui cara manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan langsung oleh pemerintah Kota Medan yang bekerjasama dengan beberapa pihak , salah satunya yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Sistem pengawasan dan pengendalian sistem ATCS dilakukan diruangan *CC-rooms* yang dipantau langsung oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan.
4. Super visi dalam pengawasan lalu lintas digunakan untuk meningkatkan kinerja petugas dalam menangani permasalahan lalu lintas, meningkatkan

keefektifan pengawasan lalu lintas, serta meningkatkan kualitas situasi yang tertib berlalu lintas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Secara umum perusahaan disarankan lebih memperhatikan dan melakukan pengecekan terhadap sistem ATCS yang tidak aktif.
2. Pihak Dinas Perhubungan juga disarankan agar menempatkan sistem ATCS di seluruh persimpangan Kota Medan, sehingga pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.
3. Untuk penelitian selanjutnya di harapkan untuk memperluas bahasan mengenai penerapan *Area Traffic Control System (ATCS)* ataupun sistem lain yang digunakan untuk memantau lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar. (2014). *Metode Penelitian*. Medan: Umsu Pers.
- Gordon, S. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Moelong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong, Lexy J, 2006 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonom*. Jakarta: Thausia.
- Putranto, L. (2007). *rekayasa Lalu lintas Jilid II*. Jakarta: PT Indeks.
- Rosalina, I. (2018). “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab.Madetaan. *Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat*, 6.
- Sarsono. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara .
- Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Waluyo, (2015). *Manajemen Lalu Lintas*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Winardi. (2008). *Manajemen Perkantoran dan Pengawasan* . Bandung: CV.Mandar Maju.
- Wishnukoro. (2008). Analisis Simpang Empat Bersinyal Dengan Menggunakan Manajemen Lalu Lintas . *JTS* .
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 20009
- Renja dan Renstra Dinas Perhubungan 2020/2021



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

013

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Nalil Khairiyah S.P. M.PD
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 26 Januari 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ANGGI KARTIKA MARPAUNG
N P M : 1703100090
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 131.0 sks, IP Kumulatif 3.58

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic control System (ATCS) dalam Pengawasan Lalu Lintas di Kota Medan.	<i>af</i>
2	Peranan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Transportasi Umum	
3	Analisis Kinerja Pegawai Kantor Camat Medan Deli Dalam Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 26 Januari 2021

Pemohon,

(... ANGGI KARTIKA M.P. ...)

Ketua,

(.....)

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor: 112/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal **26 Januari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ANGGI KARTIKA MARPAUNG**
N P M : 1703100090
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun 2020/2021
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PEMANFAATAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **Drs. R. KUSNADI, M.AP**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 013.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 26 Januari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 14 Djumadil Akhir 1442 H
28 Januari 2021M



Dekan
Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul Cerdas Terpercaya
Bila memohon surat ini agar disebutkan nomor surat ini di bagian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 17 Februari 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Anggi Kartika Marpaung
N P M : 1703100090
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2021, tanggal 26 Januari 2021, dengan judul sebagai berikut :

Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control System (ATCS)
dalam Pengawasan lalu lintas Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

(Drs. P. KUSNADI, M.A.P.)

Pemohon

(Anggi Kartika Marpaung)

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 263/UND/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Penyempitan Seminar : Naili Khairiah, S.IP., M.Pd.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	INDAH SHOULAMITA	1703100034	Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	IDA MARTINELLI, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TERHADAP PEMBIANAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN
2	ANGGI KARTIKA MARPAUNG	1703100090	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	EFEKTIVITAS PEMANFAATAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN
3	TATI APRINA MANIK	1703100080	Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.	IDA MARTINELLI, SH, MM	FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUSI KARTU TANI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN SIMALUNGUN
4	DWI PUTRI APRILIYANTI	1703100061	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M:SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	FUNGSI PENGAWASAN UPT, PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN DALAM PEREDARAN MAKANAN KEMASAN DI KOTA MEDAN
5	JULIA KHAIRYAH RITONGA	1703100081	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	PEMANFAATAN PROGRAM E-ABSENSI DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

Medan, 13 Rajab 1442 H

25 Februari 2021 M


Dr. Naili Khairiah, S.Sos., MSP.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ANGGI KARTIKA MARPAUNG
N P M : 1703100090
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMANFAATAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) DALAM PERGAWASAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	09-02-21	Bimbingan proposal skripsi dan Revisi	[Signature]
2	17-02-21	ACC Seminar proposal skripsi	[Signature]
3	02-03-21	Bimbingan Revisi dari Penguji	[Signature]
4	15-03-21	Sempurnakan kembali uraian pada bab 3 sehingga uraian, selanjutnya buat draft wawancara	[Signature]
5	19/03-21	Perbaiki kembali draft wawancara selanjutnya dapat melakukan penentuan lokasi.	[Signature]
6	26/04-21	Sempurnakan Abstrak, lokasi penelitian dan Perbaiki uraian pada bab 4 sehingga hasil wawancara	[Signature]
7	29-04-21	Sempurnakan hasil pembahasan dan daftarnya	[Signature]
8	04-05-21	ACC skripsi	[Signature]

Medan, 09 Mei 2021

Dekan,

[Signature]
(Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.P)

Ketua Jurusan,

[Signature]
(Nalik Khairiah, S.IP, M.Pd)

Pembimbing,

[Signature]
(Dr. P. Kusnadi, M.A)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 439/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 13 Syaban 1442 H
27 Maret 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **ANGGI KARTIKA MARPAUNG**
N P M : 1703100090
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PEMANFAATAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2154/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 439/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal : 27 Maret 2021 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Anggi Kartika Marpaung.**
NPM : 1703100090.
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Medan.
Judul : " Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control System (ATCS) Dalam Pengawasan Lalu Lintas di Kota Medan".
Lamanya : 2 (dua) bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan,
Pada Tanggal : 30 Maret 2021
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Medan



Drs. SYARIFUDDIN F. DONGORAN, M.Si
PEMBINA UTAMA BUDA (IV/c)
NIP. 19690430 199009 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Perteinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127
Telp. (061) 8450542

Medan, 02 JUNI 2021

Nomor : 070/ 3637 /DISHUB/IV/2021
Lamp. : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

Medan

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/2154/Balitbang/2021 Tanggal 30 Maret 2021 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa Saudari Anggi Kartika Marpaung ; NPM : 1703100090 ; Prodi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik telah selesai melaksanakan Riset di Dinas Perhubungan Kota Medan
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN



BUDI HARIONO, SStP, MAP
PEMBINA TK.I
NIP. 19760515 199612 1 001



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: *107*/KET/II.5-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Anggi Kartika Marpaung
NPM : 1703100090
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Syawal 1442 H
27 Mei 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 603/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU



Sk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	RISDAYANTI	1603100012	NALLI KHAIIRIAH, S.I.P, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2018 DALAM RANGKA STANDARISASI PENERAPAN SPEED HUMP DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
2	RAHAYU	1703100028	NALLI KHAIIRIAH, S.I.P, M.Pd	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI	Drs. R. KUSNADI, M.AP	KINERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS AKTIF DI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SIBOLGA
3	TINA AMALIA	1703100045	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IDA MARTINELLY, SH., MM	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN MANDALING NATAL
4	EVITA	1703100007	Drs. R. KUSNADI, M.AP	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI	NALLI KHAIIRIAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KABUPATEN LANGKAT
5	ANGGI KARTIKA MARPUANG	1703100090	NALLI KHAIIRIAH, S.I.P, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	EFEKTIVITAS PEMANFAATAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN

Menulis Sidang :

1.

Medan, 28 Januari 1442 H
07 Juni 2021 M

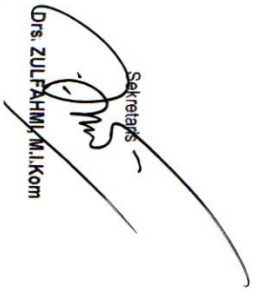
Ditetapkan oleh :
Wakil Rektor
Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum



Ketua
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Sekretaris
Drs. ZULFAHMI, M.Ikom



Panitia Ujian

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi Penelitian: Efektivitas Pemanfaatan *Area Traffic Control System*
(*Atcs*) Dalam Pengawasan Lalu Lintas di Kota Medan

Nama Peneliti : Anggi Kartika Marpaung

Npm : 1703100090

Prodi/Fakultas : Ilmu Administrasi Publik/Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Kategorisasi Penelitian : 1. Adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Adanya perencanaan yang matang
3. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian
4. Adanya supervisi dalam pengawasan

Pertanyaan wawancara berdasarkan kategorisasi

A. Adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai

1. Bagaimana proses pencapaian visi misi sistem ATCS di Dinas Perhubungan Kota Medan?
2. Bagaimana dengan tujuan dibuatnya ATCS ini? Dan apakah sudah meminimalisir permasalahan lalu lintas?
3. Bagaimana sasaran untuk mewujudkan yang diterapkan dalam sistem ATCS di Kota Medan?

B. Adanya perencanaan yang matang

1. Bagaimana proses perencanaan sistem ATCS di Kota Medan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam merencanakan sistem ATCS di Kota Medan?

3. Bagaimana tindak lanjut dari perencanaan yang telah dirumuskan secara matang?

C. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian

1. Bagaimana ada sistem pengawasan dan pengendalian sistem ATCS di Dinas Perhubungan Kota Medan?
2. Bagaimana pengawasan yang diterapkan dalam sistem ATCS?
3. Bagaimana tindak lanjut dari Dinas Perhubungan terhadap sistem pengawasan ATCS di Kota Medan?

D. Adanya supervisi dalam pengawasan

1. Bagaimana pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh aparat/petugas Dinas Perhubungan terkait pemanfaatan sistem ATCS di Kota Medan?
2. Bagaimana bentuk supervisi yang dilakukan oleh aparat/petugas terhadap sistem ATCS?
3. Apakah ada SOP dalam pelaksanaan supervisi? Jika ada bagaimana pelaksanaannya terhadap pemanfaatan sistem ATCS di Kota Medan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anggi Kartika Marpaung
Tempat/Tanggal Lahir : Rejosari, 27 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama/Bangsa : Islam/ Indonesia
Alamat : Jl. Rejosari, Tj. Medan, Rokan Hilir, Riau
Anak Ke : 8 (Delapan) dari 8 (Delapan) bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Ali Amran Marpaung
Ibu : Nurmilah Br.Sirait
Alamat Orang Tua : Jl. Rejosari, Tj. Medan, Rokan Hilir, Riau

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD Negeri No 012 Rejosari Tahun 2011, Berijazah
2. Tamat dari Mts Swasta Al Imran Nurul Yaqin Tahun 2014, Berijazah
3. Tamat dari MA Swasta Al Imran Nurul Tahun 2017, Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017 Sampai sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

Anggi Kartika Marpaung